



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. HM. Rafi'i No. 3 Telpn (0532) 21052 Fax. (0532) 29002
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

Website : bappedakotawaringinbaratkab.go.id, E-mail : bappedakabkobar@yahoo.co.id

NOTULEN RAPAT

Judul Rapat : **RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KLA**
Hari / Tanggal : Senin, 02 Juni 2021
Waktu Rapat : Pukul 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Pimpinan Rapat : Plt Dinas P3AP2KB Kotawaringin Barat

Peserta Rapat :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotawaringin Barat
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kotawaringin Barat
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Sehat
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
10. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat
12. Kepala Balai Pemasarakatan Kabupaten Kotawaringin Barat
13. Camat Arut Selatan
14. Camat Kumai
15. Camat Pangkalan Lada
16. Camat Pangkalan Banteng

17. Camat Arut Utara
 18. Camat Kotawaringin Lama
- (Daftar Hadir Terlampir)

Kegiatan Rapat : Rapat Koordinasi dan Evaluasi KLA

I. PEMAPARAN MATERI

Ibu Mila dari DP3AP2KB

- Evaluasi KLA :
 - 10 Maret 2021 : Pelatihan dan Pengiriman Aplikasi via Web
 - 15 Maret - 02 April 2021 : Penginputan data/dokumen
 - 3 Mei - 11 Juni 2021 : Verifikasi lapangan Hybrid
 - 21 – 25 Juni 2021 : Verifikasi Final
- Nilai kita berada di level utama yaitu sebesar 888,68 sedangkan target RPJMD kita di 600-700 yang berada ditingkat madya. Sehingga kita sudah melampaui target yang sudah ditentukan
- Ada beberapa kendala dalam mengumpulkan data dari beberapa dinas terkait terutama masalah perda, Kebanyakan masih dalam bentuk surat edaran. Jadi kami akan mencoba untuk mengkoordinasikan dan konsultasi dengan dinas terkait masalah perda ini. Agar bisa menambah nilai kita.
- Dari dinas perhubungan untuk bisa membuat zebra cross terutama di daerah bandara dan di sekolah-sekolah.
- Selanjutnya, salah satu kendala kita adalah dana pendukung, karena ada beberapa pertanyaan apakah kegiatan KLA ini didukung dari anggaran APBD?
- Ada 24 indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dan dibagi menjadi 5 kluster

Plt. DP3AP2KB

- Agar bisa membuat wc untuk anak di taman bermain anak-anak
- Untuk pembuatan zebra cross di bandara dan di sekolah-sekolah, agar Dishub bisa berkoordinasi dengan kepala Bandara dan Kepala Sekolah
- Mengusulkan pokir

Sekretaris Bappeda

Berikut Hasil Evaluasi KLA Tahun 2019 - 2020 :

Disdukcapil

- Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian kutipan Akta Kelahiran blm dalam bentuk Perda,
- Blm ada mekanisme untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak jalanan, anak di lapas, anak di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya,

- Kemitraan dengan Forum Anak dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran blm dapat dibuktikan dg laporan yg terdokumentasi,
- Peran Dunia usaha sebagai mitra kepemilikan akte lahir dengan disdukcapil masih sebatas sosialisasi saja,
- Peran Lembaga masyarakat (Dharma wanita bayangkari) juga sebagai mitra disdukcapil blm dapat dibuktikan dengan adanya MoU sehingga bersifat kondisional saja.

Diskominfo

- APBD terkait Penyelenggaraan ILA (Informasi Layak Anak) masih blm dalam bentuk PERDA (bila memungkinkan lebih besar dari APBN)
- Belum ada Program RADIO KHUSUS ANAK
- SDM penyelenggara ILA akan lebih baik bila dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) oleh Pusat (Kementerian PPPA).

Kementerian Agama

- Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak blm dalam bentuk Perda
- Alokasi anggaran hanya bersumber dari APBN.
- Tidak tersedia anggaran Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kementerian Agama utk Sekolah berbasis Agama
- Jumlah SRA di tingkat SD masih 6,2%, di tingkat SLTP dan SLTA baru 7,9%

DP3AP2KB

- Belum ada data/profil anak kecamatan dan Desa yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya
- Belum ada Forum Anak (FA) kecamatan aktif dan terlihat dalam Musrenbang Kecamatan (Jumlah FA kecamatan < 50%, FA Desa < 25%)
- Jumlah Desa/kelurahan layak anak < 25%
- Alokasi anggaran utk 1 FA hanya cukup utk beberapa kegiatan di Kabupaten saja.
- Belum ada SDM Media yang diikutkan dalam pelatihan KHA khususnya terkait penyelenggaraan Lembaga Pengasuhan Alternatif.

Dinas Sosial

- Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif, seperti LKSA, TPA, TAS, Pesantren/sejenisnya hanya berupa surat edaran Kepala Dinas Sosial, Nilai maksimal bila peraturan dibuat dlm bentuk PERDA
- Alokasi Dana untuk anggaran pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif hanya baru berupa anggaran utk pengelolaan informasi publik secara
- Belum pernah ada data dan dokumentasi terkait anak disabilitas yg diadopsi
- Belum ada SDM Media yang diikutkan dalam pelatihan KHA khususnya terkait penyelenggaraan Lembaga Pengasuhan Alternatif.

Dinas Perhubungan

- Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah masih berupa surat edaran Bupati
- Alokasi anggaran RASS masih lebih kecil daripada APBN
- Jumlah fasilitas RASS belum bertambah karena rasionalisasi anggaran sejak pandemi Covid-19 dan fasilitas RASS juga belum mengakomodir penyandang disabilitas
- Kemitraan LM dan DU dalam pengadaan RASS hanya sebatas sosialisasi (harapannya bila dapat berpartisipasi pada pendanaan, sarana prasarana).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Peraturan/Kebijakan tentang RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) masih dlm bentuk Perbup dan anggarannya masih lbh kecil dari APBN
- RBA belum pernah dilakukan AUDIT
- LM (Lembaga Masyarakat) yg berperan dlm kemitraan dg RBA hanya PKK Kabupaten, namun perannya pun masih sebatas sosialisasi saja (diharapkan peran dpt ditingkatkan dalam pendanaan, SDM, serta sarana prasarana)
- Peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak masih mengacu pada Peraturan Dirjen PUPR dan blm diakomodir dalam PERDA
- Alokasi anggarannya masih berasal dari APBN
- Rumah tangga yg memiliki sanitasi layak blm 100% dalam 2 th terakhir (masih ada sekitar 9% yg blm memiliki sanitasi layak)
- Blm ada peran serta dari Forum Anak dalam kegiatan peningkatan dan pemerataan Rumah Tangga dg kepemilikan sanitasi layak

Dinas Kesehatan

- Belum tersedia peraturan/kebijakan daerah khusus tentang persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19, Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak selama masa pandemi Covid-19, penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek (*stunting*), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun (masih berupa edaran bupati) disarankan masuk dalam PERDA
- Alokasi anggaran tentang persalinan di faskes dan masalah gizi, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun masih berasal dari APBN semua,
- Rata-rata cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, masih diatas target nasional (th 2020 masih < 2019)

- Tidak ada data (dokumen tersedia) tentang cakupan imunisasi selama masa pandemi covid-19 (2 tahun terakhir)
- Persentase kekurangan gizi (*underweight*)/gizi lebih (*overweight*)/*stunting* pada anak balita, IMD, ASI Eksklusif, dan MP-ASI ditahun 2020 masih dibawah target nasional
- Didalam PERDA tentang KTR belum ada disebutkan sanksi kurungan bagi yang melanggar aturan (hanya berupa teguran dan denda).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun
- Alokasi anggaran utk SRA (Sekolah Ramah Anak) blm ada di Dinas Pendidikan,
- Jumlah SRA di tingkat SD blm 100%
- SDM pengelola SRA mengikuti KHA yang diselenggarakan oleh pemda (blm dari penyelenggara KHA di Pusat
- Belum maksimalnya peran kemitraan terkait SRA baik dari DU maupun LM (pendanaan, Bimtek, evaluasi)
- Belum ada inovasi di bidang teknologi utk pengembangan SRA.

Balai Pemasarakatan Kelas II

- Belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 UUPA
- Belum terdapat sistem pendataan anak yang menjadi korban jaringan terorisme
- Belum ada upaya yang dilakukan dalam melakukan reintegrasi sosial anak korban jaringan terorisme
- Pertemuan/upacara adat utk menangani dan merehabilitasi anak korban stigmatisasi blm terdokumentasi
- Belum ada SDM terlatih penanganan anak kelompok minoritas dan terisolasi (mendapat pelatihan KHA, SPA, sistem pencatatan dan penanganan serta pengembangan potensi budayanya.
- Belum ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran
- Peran media dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan, dan penelantaran masih sebatas pemberitaan saja belum dalam hal anggaran.
- Belum ada inovasi di bidang teknologi utk pengembangan SRA.

II. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

Kepala Diskominfo

- Ada 1 kendala yang agak sulit untuk dicapai yaitu pembentukan atau inisiasi peraturan daerah

- Untuk KLA , saat ini kita masih memerlukan 9 perda dari semua kluster yang ada. Akan tetapi menurut saya ini tidak efisien. Saran saya adalah alangkah baiknya perda ini dijadikan satu perda untuk Kabupaten Layak Anak.
- Untuk program Radio, kita ada peraturan daerah tentang radio Marunting Batu Aji. Tapi dalam peraturan daerah tersebut juga ada hal yang sulit direalisasikan, yaitu tentang penyelenggaraan radio.
- Untuk radio di Kobar mulai cenderung meredup karena adanya perubahan segmentasi salah satu contohnya Radio Primadona.

Plt. DP3AP2KB

- Draf perda itu merupakan kompilasi dari semua OPD, jadi perlu ada tim tersendiri untuk membahas perda tersebut.
- Kita terbatas dalam memahami makna yang tersirat daripada informasi Kabupaten Layak Anak

Kementerian Agama

- Untuk pembuatan perda harus disinkronkan bersama secara tim, ini juga menyangkut karena Kementerian Agama bukan institusi yang bisa membuat perda.
- Semua aspek-aspek yang terkait tentang indikator layak anak, Kami di Kementerian Agama peraturan perundang-undangannya sudah jelas tentang pembatasan usia perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Perkawinan, yang sebelumnya dibawah 19 tahun bisa melakukan perkawinan tetapi sekarang harus 19 tahun keatas.

Balai Pemasarakatan Kls II

- Kami ada data laporan harian di Kotawaringin Barat ini khususnya anak yang menjadi korban jaringan terorisme
- Pada prinsipnya Balai Pemasarakatan siap mendukung agar Kotawaringin Barat bisa mencapai KLA

Dinas Kesehatan

- Selama pandemic covid-19, kita belum pernah menyusun program penanganan pandemic covid-19 sendiri. Karena selama ini kita fokus pada tatanan teknis pengelolaan pada pengendalian covid semuanya mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan.
- Untuk mewujudkan perda ini juga sangat sulit, dan tidak masuk dirancangan raperda. Tetapi untuk adaptasi pelayanan-pelayanan di era pandemi sudah kita lakukan.
- Untuk pelayanan ramah anak selama masa pandemi kita juga belum melakukan adaptasi secara maksimal karena secara resiko ketika fasilitas anak tersebut digunakan justru akan meningkatkan adanya resiko terpapar covid pada anak.
- Selanjutnya mengenai anggaran di faskes sebagian besar semuanya dari APBN.

- Kita juga berkolaborasi dengan anggaran desa, misalnya pelayanan posyandu, termasuk didalamnya juga terdapat pelayanan terhadap anak.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Untuk kemitraan yang ada dibawah dinas pendidikan, kemarin sudah berlangsung sosialisasi sekolah ramah anak oleh Bunda PAUD
- Menggandeng pihak radio tersebut untuk adanya program anak
- Untuk kemitraan yang dibawah dinas pendidikan kemaren sedang berlangsung sosialisasi sekolah ramah anak oleh Pokja Bunda PAUD. Hari ini nanti juga ada sosialisasi ramah anak di aula Kec. Arsel

Disdukcapil

- Mengenai akte kelahiran untuk anak jalanan ini paling tidak kita harus mempunyai data identitas orang tua dari anak jalanan tersebut. Tidak mungkin kita membuat akte kelahiran tanpa identitas orang tuanya.
- di Pangkalan Bun ini saya perhatikan untuk anak jalanan sepertinya tidak ada. Kecuali anak jalanan ini dari luar kota Pangkalan Bun.
- Untuk kemitraan dengan forum anak untuk saat ini masih kita koordinasikan dengan ketua forum anak dengan bidang yang terkait.
- Untuk sekarang ini, peran dunia usaha sebagai mitra kepemilikan akte lahir dengan disdukcapil masih sebatas sosialisasi saja,
- Kita memang sudah bermitra dengan Dharma Wanita Bayangkari tapi untuk MoU nya belum kita buat

Dinas PUPR

- Tentang ruang bermain ramah anak sudah kita titikan pada 3 lokasi.
- Untuk peningkatan kesehatan masyarakat, kegiatan yang paling bersinergi adalah pembangunan sanitasi layak sudah kita laksanakan baik dari APBN maupun APBD.
- Peran serta Dinas PUPR kita siap untuk mendukung ruang bermain anak.
- Diperlukan kolaborasi untuk mendukung kesehatan masyarakat

Dinas Sosial

- Untuk dukungan data dan dokumentasi mengenai anak disabilitas yang diadopsi. akan segera kami periksa datanya dikantor. Harapannya semoga ada orang dermawan yang mau adopsi anak disabilitas.

Plt. DP3AP2KB

- Minimal ada SOP untuk syarat mengadopsi anak disabilitas

Sekcam Arut Utara

- Saran dan masukan apabila ada yang kurang dalam melakukan koordinasi agar bisa dilakukan penguatan
- Kami siap membantu apa yang diperlukan mengenai data

Kec. Kolam

- Kami sudah mendeklarasikan kecamatan layak anak pada akhir tahun 2019 kemarin.
- Untuk forum anak masih terkendala administrasi, kegiatannya belum maksimal. Sekedar saran utk DP3AP2KB atau forum anak apabila ada kegiatan yang berhubungan dengan forum anak, agar forum anak dari kecamatan bisa menggandeng.
- Untuk forum anak di desa/kelurahan masih minim dan kedepan kami akan lebih menekankan lagi ke desa dan kelurahan untuk mengikuti forum anak.

Kabid Sospem Bappeda

- Indikator Kabupaten Layak Anak ini merupakan indikator yang sudah terdokumentasikan di RPJMD tahun 2017-2022. Sehingga kita dalam hal ini bersama-sama membahas dan berkoordinasi untuk mengawal terhadap pencapaian ini.
- Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang disupport ini agar bisa di ketahui sudah sejauh mana capaian terhadap indikator yang telah ditentukan. Sehingga dapat mempunyai dampak terhadap daya ungkit nilai-nilai sebagaimana yang diharapkan.
- Untuk DP3AP2KB agar bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan SKPD-SKPD terkait untuk mengkuilifikasi terhadap pointer-pointer mana yang sudah disampaikan agar bisa di dukung.

Pangkalan Bun, 7 Juni 2021

Notulis



Ika Farida Oktaviani, S.IP